

kas 392

**KEBUDAYAAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL  
SEBAGAI PELUANG DAN KENDALA MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
(DITINJAU MELALUI PENDEKATAN KETAHANAN NASIONAL)**

MILIK PERPUSTAKAAN UPT. PADANG	
DITERIMA TGL. :	24 SEP 1997
SUMBER / HARGA :	K. /
KOLEKSI :	K.K.I
NO. INVENTARIS :	1653/K/97 - K. (2)
LOKASI :	306.09598 KKM - K



**UPT. PERPUSTAKAAN IKIP PADANG  
TELAH TERDAFTAR**

JUDUL : \_\_\_\_\_

PENGARANG : \_\_\_\_\_

JENIS : \_\_\_\_\_  
OLEH : \_\_\_\_\_

No. DAFTAR : \_\_\_\_\_  
**DRS. A. K. M. G. A. L. : 27 DEC 1996**

KEPALA,

**DRS. BARHAYA ALI.M.L.S**  
NIP. 130215599

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
INSTITUT KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN  
(IKIP) PADANG**

1996

**MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG**

## KEBUDAYAAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT MULTIETNIK SEBAGAI PELUANG DAN KENDALA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Ditinjau Melalui Pendekatan Ketahanan Nasional)

---

### A. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan salah satu sumber utama dari sistem atau tata nilai yang dihayati atau dianut seseorang atau masyarakat, yang selanjutnya membentuk sikap mental atau pola berfikirnya. Sikap mental itu mempengaruhi dan membentuk pola tingkahlakunya dalam berbagai aspek kehidupannya yang pada gilirannya melahirkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan karya lainnya. Semua itu mencerminkan kualitas kebudayaan itu sendiri (Alpian, 1982:18). Didalam negara Republik Indonesia kebudayaan nasional dibangun berdasarkan konsep penjelasan pasal 32 UUD 1945, yaitu dari tiga faktor: (1) budaya yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, (2) budaya lama atau asli sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, dan (3) budaya asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri. Kemajemukan budaya sebagai asset dalam membangun kebudayaan nasional. Jowono Sudarsono mengingatkan "bahwa kita dalam membangun kebudayaan nasional dalam suatu demokrasi Pancasila sedang mencari bentuk yang mencerminkan etika masyarakat pada umumnya, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan bermanfaat untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman" (MG Sianipar, 1984: ).

Puncak-puncak budaya daerah yang bernekaragam tadi akan melahirkan saling interaksi sehingga membentuk kebudayaan nasional secara alamiah. Alamiah itu niscaya terjadi karena manusia ingin kebersamaan dalam menuju kesejahteraan dan keamanan bersama (hakekat ketahanan nasional adalah *jah dan kam*). Untuk itu, kebhinnekaan budaya niscaya juga akan dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara melalui pemerintah yang berkuasa (amanat Penjelasan Pasal 18 UUD. 1945). Pembangunan nasional dilaksanakan dengan mengindahkan keanekaragaman tadi, bukan diseragamkan. Penyeragaman

merupakan suatu tindakan totaliter jika hal itu terjadi dan dapat menjadi ancaman bagi pembangunan nasional bila pemerintah mengabaikan kebudayaan etnik bangsanya. Memanfaatkan kemajemukan budaya masyarakat secara proporsional merupakan peluang memacu pembangunan nasional. Sebaliknya jika budaya daerah tidak dimanfaatkan bisa menjadi bumerang bagi pembangunan itu sendiri, seperti yang terjadi pada kasus Timika Irian Jaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardjo (1983:22) " bahwa pemaksaan suatu tata nilai ataupun norma baru oleh yang merasa mayoritas kepada kelompok yang minoritas akan mempermudah terjadinya pertikaian serta mempengaruhi masalah-masalah nilai budaya".

Lebih lanjut S. Budhisantoso mengungkapkan " bahwa kemajemukan suatu masyarakat sering diabaikan orang dalam usaha pembangunan suatu bangsa. Seolah-olah apabila suatu bangsa telah lahir baik secara damai atau peperangan, segalanya telah siap untuk membangun selanjutnya. Ada anggapan bahwa masyarakat itu suatu kesatuan sosial yang dengan sendirinya terwujud secara utuh dan mendukung suatu tradisi kebudayaan yang sama. Orang mengabaikan adanya kemungkinan pengelompokan sosial didalamnya yang disamping membantu kelancaran bermasyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial" (S.Budhisantoso,1993/1994: 2).

Berhadapan dengan itu, penulis ingin melihat faktor-faktor penunjang dari kemajemukan budaya daerah bagi pembangunan nasional dan faktor-faktor penghambat dari kemajemukan tersebut.

### *B. Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini ingin mengkaji : " apakah yang menjadi peluang dan kendala dari kebudayaan Indonesia yang majemuk untuk menuju pembangunan nasional ditinjau melalui pendekatan ketahanan nasional "

C. Pembahasan

1. Kaitan Kebudayaan Dengan Pembangunan Nasional Dalam Masyarakat Indonesia yang Multietnik

Pembangunan adalah perubahan menuju pola masyarakat yang memungkinkan terwujudnya nilai-nilai manusiawi yang lebih baik, yang memungkinkan suatu masyarakat memperluas fungsi pengawasannya terhadap lingkungan mereka serta atas tujuan politik mereka sendiri, dan memperkenankan setiap pribadi untuk mengatur diri secara lebih bebas (Inayatullah,1967:101). Dengan kata lain pembangunan sebagai suatu proses partisipasi di segala bidang dalam perubahan sosial dalam suatu masyarakat, dengan tujuan membuat kemajuan sosial dan material (termasuk pemerataan, kebebasan serta berbagai kualitas lainnya secara lebih besar) bagi sebagian besar masyarakat dengan kemampuan mereka yang lebih besar untuk mengatur lingkungannya (Rogers,1975:345).

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kehidupan kenegaraan itu disamping membawa kemajuan bagi bangsa tersebut juga dapat menimbulkan dampak sebagai suatu masalah sosial. Menurut Paul B. Horton (1992:237) "suatu masalah sosial seringkali disebut suatu kondisi yang tidak disenangi oleh banyak orang, sehingga ingin memperbaikinya. Tetapi suatu masyarakat yang terintegrasi secara baik tidak akan menghadapi masalah sosial, karena segenap institusi dan kegiatan akan selaras dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat". Kemajuan yang dicapai dalam pembangunan secara alamiah mengundang tuntutan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Untuk itu. "Kebanyakan orang kurang menyadari akan adanya dampak yang timbul sebagai akibat meningkatnya kesejahteraan hidup itu sendiri. Tidak banyak yang menyadari akan terjadinya perubahan di segala sektor kehidupan, disamping tantangan baru yang harus dihadapi" (S.Budhisantoso,1991:1). Pemerintah sering kaget terhadap setiap peristiwa yang terjadi seperti kenapa buruh demonstrasi, orang menuntut demokratisasi yang lebih transparan, seolah-olah tidak disadari bahwa akan terjadi perubahan dari pembangunan itu. Hal senada diungkapkan Schon (1967: ) bahwa perubahan

bukan lagi dianggap sebagai kekuatan yang merusak, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang stabil.

Di samping faktor dalam masyarakat (internal factors) pembangunan yang menyebabkan perkembangan industri itu sendiri telah merangsang perubahan sosial yang tidak dapat diabaikan seperti yang diungkapkan S. Budhisantoso berikut ini: (1) melemahnya peranan pertanian subsistensi berskala kecil yang digeser oleh pertanian komersial dalam skala besar, (2) Perkembangan industri yang menyediakan lapangan kerja baru, (3) Penduduk kota berkembang dengan pesat, sehingga menimbulkan berbagai masalah sosial budaya dalam proses adaptasi mereka dalam masyarakat yang heterogen antara lain melebarnya kesenjangan sosial, (4) Intensifikasi pembagian kerja mendesak pengrajin yang semula keahlian dan keterampilan tradisional, digantikan oleh pekerja tanpa keahlian untuk melayani mesin, (5) Berkembangnya nilai-nilai budaya yang mengarah ke perdagangan, kebendaan dan persaingan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, filsafat dan keagamaan, (6) Pekerja harus menyesuaikan diri dengan ketepatan, kecepatan dan keteraturan mesin, (7) Perkembangan sarana pengangkutan dan perhubungan yang menyangga kegiatan industri mempertinggi mobilitas penduduk dan memperlancar kontak-kontak budaya yang melintasi batas wilayah geografis, politik dan kebudayaan sehingga dapat mengancam kelestarian identitas nasional dan (8) Munculnya kelas menengah baru yang mengembangkan gaya hidup tertentu di kota-kota, akibatnya selain membuka kesempatan kerja di bidang pelayanan, juga menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin tajam (S. Budhisantoso, 1973:3-4).

Masyarakat industri yang berkesenjangan itu mengusur ciri-ciri masyarakat agraris yang pada umumnya berpegang teguh pada: (1) Makna dan tujuan hidup, di selaraskan dengan sistem pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, (2) Nilai-nilai budayanya menghargai tinggi keseimbangan lingkungan dalam arti luas yang diperkuat dengan berbagai kepercayaan, (3) Mementingkan kelestarian kehidupan dengan pengembangan teknologi dan

penggunaan energi secara tidak berlebihan, (4) Menghindarkan resiko terhadap taraf kehidupan dan di masa mendatang, (5) Karena alasan tersebut butir ke empat, kualitas hidup mereka sejalan dengan perkembangan kebudayaan atau kearifan lingkungan yang aman terhadap lingkungan, (6) Akibat selanjutnya, mereka terikat pada suatu lingkungan geografi tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif tidak banyak berkembang dengan sumber daya alam yang tersedia (S. Budhisantoso, 19 : 4-5).

Pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi, Pembangunan harus dipandang sebagai proses multi-dimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Disamping upaya-upaya peningkatan pendapatan dan hasil, pembangunan juga memerlukan perubahan-perubahan secara seksama pada struktur-struktur kelembagaan, sosial, dan administrasi, sikap-sikap masyarakat dan bahkan kebiasaan dan keyakinan. Akhirnya, meskipun pembangunan biasanya dibatasi dalam konteks nasional, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pembangunan memerlukan perubahan sistem sosial dan ekonomi dalam konteks internasional (Todaro, 1982:87). Jika masalah ini terabaikan akan timbul gejolak sosial. Menurut S. Budhisantoso, 19 : 7) bahwa gejolak sosial dalam masyarakat industri yang penuh persaingan itu perlu ditegakkan hukum secara konsisten yang dapat menjamin rasa aman dan keadilan penduduk. Kebutuhan akan kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban penduduk itu semakin terasa dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan sedang membangun. Perkembangan yang demikian cepat berlangsung, membuka peluang bagi mereka yang siap dan peka secara budaya, akan tetapi sebaliknya menyisihkan mereka yang masih terikat kuat oleh tradisi. Karena itu diperlukan perlindungan hukum dan sarana ataupun organisasi yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan mereka yang telah siap berpacu dalam pembangunan agar dapat ikut menikmati hasilnya.

Berhadapan dengan itu, ternyata faktor kebudayaan tidak bisa dibiarkan begitu saja dalam pembangunan nasional. Kebudayaan memberikan sumbangan

yang berarti terhadap kelancaran pembangunan itu sendiri, terutama bagi Republik Indonesia yang masyarakatnya heterogen.

## 2. Beberapa Kendala Keanekaragaman Budaya Tradisional Menuju Pembangunan Nasional dan Upaya Penanggulangannya

Konflik dan integrasi merupakan dua gejala yang selalu hidup bersisian dalam masyarakat yang multietnik, di negara Republik Indonesia. pengalaman konflik yang berkepanjangan sering terjadi, baik konflik daerah maupun konflik ideologi politik seperti dapat diungkapkan kasus: Abepura, Mapenduma, Jenggawa, Timtim, Flores, Pembakaran Masjid di Timtim, perusakan gereja di serang. Ekspresi konflik dalam bentuk lain seperti penyimpangan dan patologi sosial, premanisme, kekerasan, perkelahian antar warga dan antar pelajar. Disamping itu, konsensus-konsensus baru pun dalam dalam integrasi nasional cukup banyak yang dicapai seperti Papol dan Golkar menerapkan Pancasila sebagai azas tunggal termasuk organisasi kemasyarakatan. dan munculnya organisasi-organisasi profesi yang bersifat nasional yang tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan, seperti: ISEI, Ikadin, IDI, PU, SPSI, Kadin, Gapensi, REI, dan lainnya. Menurut Siswono (1996:8) "kita perlu melonggarkan, mengurangi pengelompokan-pengelompokan atas dasar etnis, agama yang mempunyai tujuan politik, sebaliknya perlu dikembangkan kemandirian kelompok-kelompok budaya. Perlunya dibangun nilai dasar dalam pertautan masyarakat kita yang majemuk". Variabel pembeda yang melahirkan pemilihan masyarakat secara tajam harus dihilangkan seperti asal daerah, agama, kelas ekonomi dan membuat kelompok-kelompok tertentu dalam instansi baik swasta maupun pemerintahan atas kelompok etnik tertentu yang membahayakan bagi kebersamaan dalam kehidupan kenegaraan kita.

Untuk itu, sarana untuk membangun integrasi bangsa perlu ditumbuh kembangkan secara terus menerus, seperti melalui dunia pendidikan, orsospol nasional, birokrasi pemerintahan, dan identitas-identitas nasional lainnya sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teori-teori tentang

pembangunan politik selama kurun waktu 1980-an banyak didominasi oleh pemikiran-pemikiran untuk menemukan sejumlah teknik baik melalui sistem pendidikan, kebudayaan, bahasa maupun sarana-sarana komunikasi guna memacu integrasi bangsa. Dalam dasawarsa sekarang ada yang sudah menilai munculnya kelas menengah baru sebagai penerus generasi dan juga sebagai pondasi dalam pembangunan bangsa, tetapi dilain pihak sejumlah ahli meragukan kebenaran tesis itu, karena orang-orang kaya dan terdidik itu masih jauh dari mencerminkan kelas menengah, dengan alasan mereka itu tidak memiliki syarat yaitu kesadaran kelas. Mereka lahir lewat tangan negara, dekat dengan kekuasaan, dan jago kandang tidak mampu bersaing dengan dunia luar serta belum memikirkan kepentingan banyak orang.

Mengingat kebutuhan akan peremajaan dalam setiap kelompok sosial atau komunitas, pendidikan dalam arti luas merupakan salah satu kebutuhan yang tak mungkin diabaikan. Setiap komuniti dimanapun berada dan betapapun sederhananya teknologi yang digunakan; pasti mengembangkan wadah dan kegiatan pendidikan untuk mempersiapkan anggota-anggotanya agar mampu memainkan peran sesuai dengan kedudukan-kedudukan sosial mereka dalam komuniti yang bersangkutan. Kepada mereka juga ditanamkan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial dan pandangan alam semesta yang berlaku sebagai kerangka acuan dalam mengembangkan dan menentukan pilihan hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya (S.Budhisantoso, 1995:2).

Letak dan tatanan geografik kepulauan juga telah membuka peluang maupun kendala tertentu bagi kelancaran persebaran dan persentuhan budaya antar bangsa. Ada sejumlah bandar di berbagai pulau yang berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan dan kontak-kontak budaya karena letaknya di lintasan jaringan perhubungan dan mudah di jangkau. Sementara itu banyak pula pusat-pusat permukiman yang jauh dari lintasan mobilitas penduduk dan sulit dikunjungi dengan menggunakan sarana pengangkutan sederhana. Keterasingan pergaulan dengan masyarakat yang lebih luas itu membuat mereka "tertinggal" dalam pengembangan teknologi dan terpaku pada lingkungannya yang relatif



terbatas (S.Budhisantoso,1995:4). Untuk itu, - diperlukan pembangunan transportasi dan sarana telekomunikasi sehingga mengundang investor menanamkan modalnya di daerah-daerah terpencil.

Selanjutnya S. Budhisantoso mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah Irian Jaya masih merupakan hutan belantara yang belum pernah di jajah manusia. Masyarakat Dani yang tinggal di lembah Baliem terkenal sebagai suku yang suka berperang, karena itu pendidikan dalam masyarakat lebih ditekankan pada semangat peperangan. Anak-anak sejak kecil sudah mulai di persiapkan menjadi seorang prajurit yang baik. Bila telah dewasa melalui latihan-latihan untuk menjadi lelaki yang kuat dan besar, selesai latihan anak-anak itu akan menerima tombak dan panah sebagai senjata prajurit. Keteringgal pendidikan menyebabkan mereka tidak memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan yang strategis pada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu. Munculnya wawasan yang sempit karena keterbelakangan pendidikan disamping kesenjangan yang dirasakan warga daerah. Akibatnya timbul gerakan-gerakan yang berjuang demi keadilan dan mengarah kepada disintegrasi, seperti gerakan OPM, dibawah pimpinan Rumkorem yang pada tanggal 1 Juli 1971 memproklamirkan negara Papua Barat dan berlanjut dengan gerakan elit intelektual Thomas Waggai tanggal 14 Desember 1988 yang memproklamirkan negara Melanèsia Barat. Orang Irian mempersoalkan hasil kekayaan tambang tembaga dan emas yang berada di pegunungan Ertsberg dan Grasberg di sekitar Timika Tembagapura yang terus dikeruk Freeport dengan izin Jakarta. Di satu pihak mereka sebagai rakyat asli tetap miskin. Untuk itu, tuntutan mereka atas Freeport adalah beralasan. Dana yang dituntut itu bisa digunakan untuk mencetak sumber daya manusia orang Irian. Pendidikan yang dimiliki akan dapat menjembatani antara pemerintah pusat dengan rakyat daerah.

Pembangunan dunia pendidikan di daerah harus disesuaikan dengan potensi daerah dan minat masyarakat yang bersangkutan. M.J.Herkovits (1951:111) menyatakan kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa mensenyawakan yang baru pada yang lama, begitu pula penyerapan pembaharuan itu hanya bisa

dirasakan bila tidak dipaksakan. Pembaruan itu sampai menimbulkan frustrasi, karena kegiatan dan pengadaan kemudahan yang diperlukan setelah pengenalan pendidikan belum tersedia. Akibatnya bisa fatal, yaitu dengan menjadi antipati kepada setiap bentuk pembaharuan betapapun baik tujuannya.

Kenyataan akan kemungkinan adanya ketegangan dan pertentangan setiap kesatuan sosial karena adanya perbenturan kepentingan antara mereka yang berusaha untuk mengatasi perbedaan dalam mengembangkan dalam kebersamaan. Dilain pihak ada yang berusaha mempertahankan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat (S. Budhisantoso, 1993:3). Oleh karena itu dinamika penggolakan sosial sebagai akibat pergaulan antar suku bangsa atau golongan dalam suatu masyarakat bangsa yang majemuk tidak dapat diabaikan. Selain hal itu akan menimbulkan ketidakseimbangan sosial; juga dapat memacu perubahan ke arah pembaharuan.

Masyarakat daerah sesuai dengan dinamikanya ingin diakui dan dihormati keberadaan dan otonominya sebagai salah satu bagian dari masyarakat bangsa yang sama hak dan kewajibannya dihadapan negara (pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Adat istiadat mereka niscaya dihormati negara dan pemerintah berkewajiban menghormatinya sehingga kesetiaan mereka terhadap pembangunan dapat disejajarkan. Kenyataannya, banyak ada kelompok sosial yang menggunakan bahasa yang berbeda dalam lingkungan budaya yang sama, serta pengelompokkan dalam pemukiman, kelas ekonomi baru, dan elit baru dalam strata baru yang serba mewah seperti yang kaya punya lapangan golf, shopping ke luar negeri, dan bisa bikin vila-vila mewah; di pihak lain mereka yang tidak mampu tergusur ke pinggir-pinggir kota. Kondisi ini ikut memperbesar masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Dewasa ini pemerintah dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia, menghadapi masalah yang timbul karena kemajemukan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Menurut Koentjaraningrat (1996:3) "bahwa sebagian besar negara-negara di dunia bersifat multi-etnik. Di antara 175 negara anggota PBB, hanya 12 negara yang penduduknya kurang lebih homogen".

Seperti Indonesia beragam sukubangsa, agama, ras, dan golongan telah mempertajam kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia. Belum lagi kemajemukan yang ditimbulkan karena masyarakat terasing atau penduduk asli yang tidak menyadari akan adanya masyarakat bangsa yang melibatkan mereka dalam kesatuan sosial yang lebih besar. Mereka seolah-olah belum tersentuh oleh jaringan sosial baru yang bersifat nasional. Lebih lanjut Koentjaraningrat (1993:18) mengungkapkan bahwa beberapa golongan masyarakat yang terasing yang masih tinggal adalah: (1) orang laut yang bersifat pengembara, (2) orang darat, yang hidup tersebar di dataran rendah berawa di Sumatera Timur hingga kekaki Bukit Barisan di pedalaman, (3) penduduk kepulauan Mentawai, pualu-pulau sebelah barat Sumatera Barat, (4) orang Badui di banten Selatan, Jawa Barat, (5) orang Donggo di bagian pedalaman pegunungan Sumatera Timur, (6) kelompok pengembara orang Punan yang berpindah-pindah di sepanjang hulu sungai-sungai besar Kalimantan, (7) orang Tajio di Sulawesi Tengah, (8) orang Amma Toa di Sulawesi Tenggara, (9) orang Togutil di Halmahera Utara, dan (10) penduduk lembah-lembah pegunungan tengah di Irian Jaya serta mereka yang hidup di hulu-hulu beberapa sungai besar. Keanekaragaman kondisi sebagai suatu kenyataan tersebut nampaknya disadari oleh para pendiri negara RI pada awal kemerdekaan sebagaimana tersimpul dalam pasal 32 UUD '45.

Menurut perkiraan terakhir di Republik Indonesia hidup lebih dari 500 suku bangsa yang mengembangkan masing-masing secara mandiri, kira-kira 42% dari keseluruhan penduduk Indonesia adalah sukubangsa Jawa. Suku-suku bangsa itu pada umumnya berasal dan menduduki wilayah pemukiman tertentu, pergaulan diluar lingkungan keluarga dan melintasi masyarakat suku bangsa itu telah mendorong perkembangan kebudayaan "pasar" yang berfungsi sebagai kerangka acuan bersama (S. Budhisantoso, 1993:5). Selanjutnya dikatakan bahwa "kebudayaan nasional itu belum sepenuhnya berkembang dan memenuhi kebutuhan namun pengaruhnya cukup kuat. Disamping itu, karena pengaruh kebudayaan-kebudayaan sukubangsa dan daerah terbatas lingkupnya, di masing-masing dilingkungan kerabat maupun daerah tertentu. Dengan demikian

kebudayaan-kebudayaan Indonesia kini dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu kebudayaan-kebudayaan sukubangsa, kebudayaan-kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional". "ternyata kebudayaan daerah merupakan dominan di daerah yang penduduknya heterogin; maka kebudayaan nasional menjadi kebudayaan dominan di seluruh tanah air".

Pelaksanaan seringkali menimbulkan gejala sosial, terutama karena timbulnya kesan adanya dominasi salah satu kebudayaan dalam prosesnya. Disamping itu karena perkembangan kebudayaan nasional belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan kerangka acuan bagi segala sektor kehidupan, seringkali orang cenderung mengacu pada kebudayaan daerah atau sukubangsa masing-masing. Kebiasaan tersebut seringkali menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (S.Budhisantoso, 1993:8).

Selanjutnya dikatakan S.Budhisantoso bahwa kalau orang mulai memperhatikan pembagian kekuasaan politik dan ekonomi seolah-olah hanya mereka yang benar-benar menghayati kebudayaan nasional yang mampu memanfaatkan peluang. Orang-orang berusaha mengakrabkan diri dengan simbol dan pranata sosial para tokoh dan pejabat nasional. Kenyataan ini menimbulkan kesan akan adanya dominasi kebudayaan suatu sukubangsa atau daerah dari mana tokoh-tokoh politik dan ekonomi itu berasal, seperti pembentukan organisasi kekerabatan dan kedaerahan, pekan-pekan seni-budaya, kesenian dan kebudayaan, sampai pada tuntutan akan pengakuan pahlawan nasional yang seolah-olah mewakili daerah atau suku bangsa masing-masing.

Banyak celah-celah kehidupan bermasyarakat yang harus diselenggarakan dengan mengacu pada kebudayaan sukubangsa dan atau daerah tertentu. Untuk menutupi kebutuhan akan celah-celah kerangka acuan dalam pergaulan sosial yang bersifat nasional itu, tidak jarang orang mengambil alih atau mengacu pada kebudayaan sukubangsa. Tiga faktor yang sangat berpengaruh, yaitu faktor kependudukan, faktor kemapanan kebudayaan setempat dan faktor kekuasaan politik serta pemerataannya. Ada kesan bahwa sumbangan kebudayaan Jawa dalam pengembangan kebudayaan nasional melebihi sumbangan kebudayaan

daerah lainnya. Karena orang cenderung untuk melihat jumlah personil yang berhasil menempati kedudukan-kedudukan di pusat kekuasaan dari pada memperhatikan sistim budaya yang berlaku (S.Budhisantoso,1993,11).

### 3. Beberapa Peluang Kebudayaan Nasional Dalam Masyarakat Multi-etnik

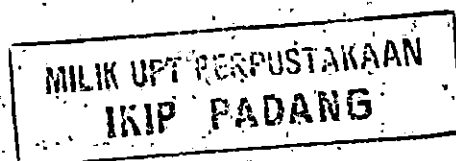
Pengembangan kebudayaan nasional sebagai kebudayaan yang dominan harus mampu menjamin kesertaan penduduk dalam kegiatan sosial politik dan ekonomi dengan memberi peluang yang sama sehingga memperlancar mobilitas sosial tanpa membedakan asal-usul kesukuan dan kedaerahan (S. Budhisantoso, 1993:13).

Ada tiga kekuatan yang mendorong perkembangan sosial dan kebudayaan, yaitu: Pertama, kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri antara lain karena kemajuan pendidikan yang memperlancar mobilitas sosial sehingga merangsang perkembangan pranata-pranata yang diperlukan. Kedua, ialah pesatnya kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi yang diterapkan dalam proses produksi sehingga merangsang perkembangan pranata sosial dan nilai-nilai budaya dalam kaitannya dengan perhimpunan modal, intensifikasi organisasi dan pengerahan tenaga kerja trampil dan ahli. Ketiga, ialah meningkatnya intensitas sentuhan budaya baik langsung atau pun tidak langsung yang merangsang pengembangan dan pengkayaan nilai-nilai budaya setempat (S.Budhisantoso,19...:1).

Kekuatan pembaharuan lainnya yang selama ini menjadi momok masyarakat tetapi tidak mungkin dihindarkan ialah sentuhan budaya ( cultural encounters ). Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan teknologi, telah memperlancar mobilitas penduduk dan komunikasi yang mendorong peningkatan intensitas kontak-kontak budaya secara langsung ataupun tidak langsung.

Proses akulturasi yang besar kecilnya dampak tergantung pada 5 prinsip yang berlaku umum, yaitu prinsip:

1. Pendidikan dini (early learning)



2. Kekongritan (concreteness)
3. Kegunaan (utility)
4. Keterkaitan (social function)
5. Keterpaduan (integration) (S.Budhisantoso, 19...:5)

Pembangunan nasional dalam memajukan kebudayaan nasional secara berencana dan terarah yang bertumbuh pada puncak-puncak kebudayaan daerah dan diperkaya dengan kebudayaan asing niscaya akan mendukung peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dalam menuju negara maju dan mandiri

Kebudayaan industri itu biasanya mempunyai ciri-ciri: (1) Keterbukaan terhadap pengalaman baru, mengingat orang-orang yang masih berpegang pada tradisi, biasanya kurang bergairah untuk menerima pembaruan, ide-ide dan cara berpikir maupun bereaksi, (2) Kesiapan untuk menghadapi perubahan sosial yang sangat erat kaitannya dengan keterbukaan terhadap pengalaman baru, terutama dalam menerima kenyataan dan kesertaan dalam kehidupan politik yang lebih luas, meningkatkan mobilitas sosial dan penduduk, sehingga membuka kesempatan pergaulan yang lebih lancar antara atasan dan bawahan serta antara orang tua dan orang muda, (3) Kesiapan mengembangkan dan mengemukakan pendapat yang tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut kepentingan diri pribadinya. Dapat menghargai perbedaan pendapat dan sikap orang-orang disekitarnya. Seseorang tidak menerima pendapat karena datangnya dari sernata atasan dan menolak pendapat dan sikap bawahan di sekitarnya, melainkan karena nilai-nilai positif, (4) Keakraban dan keaktifan mengejar fakta dan informasi, (5) Lebih mementingkan perhatian pada masa kini dan pada masa mendatang dari pada masa lalu (co-gigurative), (6) Percaya pada kemampuan diri untuk menguasai lingkungan (efficacy), daripada merasa harus menggantungkan diri pada kemampuan orang lain ataupun menyerah pada kekuatan alam, untuk menciptakan lingkungan baru atau mengadakan perubahan. Dalam kaitan ini juga ditambahkan sifat-sifat optimisme dan universalistis, (7) Berpandangan jauh ke depan dan senantiasa mengandalkan perencanaan daripada menghadapi

tantangan dari hari ke hari tanpa kepastian, (8) Percaya bahwa segala sesuatu itu dapat diperhitungkan, dan orang-orang maupun lembaga di sekitarnya dapat diandalkan untuk melaksanakan kewajiban masing-masing (9) Menghargai keahlian teknik dan pemerataan keadilan. Karena itu seseorang harus dihargai sesuai dengan keahlian, Khususnya keahlian baru yang sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi, (10) Penghargaan terhadap pendidikan formal dan sekolah kejuruan serta lapangan kerja yang tersedia. Hal ini penting karena ada sementara masyarakat yang beranggapan pendidikan formal akan memperlemah keyakinan atau kepercayaan orang terhadap keyakinan agama, (11) Sadar dan menghormati harga diri orang lain tanpa memperhatikan asal-usul kedudukan sosial seseorang, (12) Penghargaan terhadap logika yang melandasi suatu keputusan terhadap kegiatan produksi (S.Budhisantoso, 19...: 9-10).

Untuk itu, perkembangan kebudayaan nasional amat penting artinya dalam memantapkan konfigurasi budaya yang akan memberi makna serta arah kehidupan masyarakat satu bangsa yang merdeka, yaitu dengan memberi kedudukan dan peranan bagi kebudayaan-kebudayaan daerah untuk tumbuh dan berkembang di daerah-daerah (Penjelasan pasal 18 UUD 1945), sebagai kerangka acuan yang memberi makna dalam kehidupan masyarakat pendukungnya yang bersifat setempat, melainkan juga penting sebagai sumber dan landasan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Puncak-puncak budaya daerah artinya adalah nilai-nilai yang relevan dan komunikatif yang dapat diterima segenap anggota masyarakat, atau nilai inti yang merupakan pengetahuan abstrak yang terdapat di kepala setiap pendukungnya. Sebagai contoh dalam budaya Minangkabau: yang mengartikan raja bukanlah orang atau manusia, tetapi raja itu adalah kebenaran dan kebenaran itu merupakan suara banyak orang yang lahir dari pengambilan suatu keputusan. Keputusan harus dilaksanakan secara musyawarah mufakat (hal ini didukung oleh pepatah adat).

Disamping itu pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan yang terdapat di daerah-daerah akan mewujudkan kesamaan nilai, perasaan dan moral yang menjiwai

sikap dan pola tingkah laku masyarakat Indonesia sebagaimana tersimpul dalam sila-sila Pancasila secara keseluruhan. Nilai-nilai dasar ( nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan) merupakan nilai universal sebagai titik temu dari berbagai sukubangsa di Indonesia. Penjabaran nilai-nilai dasar tadi kedalam 36 butir nilai yang dikenal dalam Tap MPR No.II/1978 sebagai acuan operasionalisasi nilai dalam mencapai tujuan bersama. Pancasila dijadikan kerangka berfikir dan moral pembangunan nasional. Pancasila yang tertuang dalam empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945, yaitu negara persatuan, negara berkeadilan, negara berkedaulatan rakyat, dan negara yang kerketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan kewajiban negara memelihara budi pekerti rakyat yang luhur. Dengan kata lain, Budi pekerti rakyat yang luhur sebagai nilai bersama tadi transformasikan kedalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, ia harus dijalankan secara konsisten terutama oleh aparat negara sebagai anutan masyarakat Indonesia.

Kebersamaan inti budaya itu sangat penting artinya dalam usaha pembinaan ketahanan nasional karena ia akan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dalam masyarakat majemuk, demikian pula dengan kesatuan sistim lambang sebagai sarana pergaulan yang berwujud bahasa nasional, pergaulan sosial antar sesama anggota masyarakat bangsa Indonesia dapat dijamin dengan memperkecil ketegangan maupun pertentangan sosial. Sementara itu tujuan kemerdekaan ialah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani secara serasi, seimbang dan selaras. Pada gilirannya pembangunan nasional akan menimbulkan berbagai macam kebutuhan yang mendorong perkembangan bangsa (S.Budhisantoso,1985:10).

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang perhubungan dan pengangkutan serta letak geografis kepulauan Nusantara, akan meningkatkan kontak-kontak budaya antar bangsa. Pengambilalihan ilmu dan teknologi yang diperlukan untuk mempercepat usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat



akan mendorong pergambalihan berbagai unsur budaya asing yang tidak kecil pengaruhnya bagi perkembangan kebudayaan nasional.

Berdasarkan kenyataan tersebut pengembangan kebudayaan nasional Indonesia harus dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Wawasan nusantara : dalam kaitan ini perlu digali ethos dan konfigurasi kebudayaan-kebudayaan daerah untuk diperkenalkan dan ditawarkan kepada masyarakat dalam rangka memperkembangkan budaya nasional.
- (2) Pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan kebudayaan nasional, melalui pendidikan budaya bangsa perlu ditingkatkan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Usaha pendidikan budaya bangsa (enkulturasi) ditujukan untuk memperkenalkan, menawarkan, menanamkan serta mengukuhkan nilai-nilai, norma-norma sosial dan pandangan hidup yang sesuai dengan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Pancasila serta UUD-45.
- (3) Pembinaan kepribadian bangsa yang dilandasi pengetahuan budaya nasional diarahkan untuk membina segenap warga negara menjadi pendukung kebudayaan yang aktif (S.Budhisantoso:19. )

Kedudukan kebudayaan suku bangsa itu amat penting artinya bagi setiap orang Indonesia, karena justru ia mulai mengenal lingkungannya dalam arti luas dengan mengacu pada kebudayaan yang ditanamkan oleh orang tuanya sejak ia lahir dan mampu menyerap pengetahuan.

Dalam suasana kehidupan sosial yang majemuk itu biasanya lalu berkembang kebudayaan setempat (daerah) yang merupakan perpaduan antar berbagai kebudayaan yang ada ditempat biasanya didominasi oleh salah satu kebudayaan yang lebih mudah diterima oleh kebanyakan penduduk. Berbagai sistim budaya nasional yang berlaku dewasa ini dapat disebut antara lain dalam sektor organisasi politik dan pemerintahan, sektor pendidikan, sektor perekonomian khususnya yang menyangkut kebijaksanaan keuangan dan lain-lain sistim yang bersifat formal seperti hukum dan perundang-undangan.

Hubungan antar sesama guru ataupun hubungan antar guru dan murid di kota-kota besar, sudah mengacu pada budaya nasional.

Oleh karena itulah kedudukan dan peranan kebudayaan daerah menjadi amat penting artinya mengisi kekosongan kerangka acuan di berbagai gelanggang kehidupan sosial budaya bangsa.

S. Budhisantoso mengingatkan bahwa pengembangan kebudayaan nasional Indonesia itu berarti bahwa kita tidak boleh terbelenggu oleh nilai-nilai budaya tradisional semata-mata tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi serta perubahan lingkungan.

Dengan mengindahkan nilai budaya daerah dalam memacu pembangunan nasional niscaya membawa kemudahan bagi pembangunan itu sendiri karena budaya daerah dari berbagai sukubangsa tadi dapat menjadi motor penggerak dan pemberi arah dan makna bagi kehidupan masyarakat di daerah.

Berhadapan dengan pemikiran di atas, kenyataannya aspek sosial budaya amatlah mempengaruhi aspek kehidupan kenegaraan keseluruhannya. Dengan kata lain jika gatra sosial budaya terganggu akan mempengaruhi gatra kehidupan politik bangsa, kehidupan ekonomi, dan kehidupan pertahanan keamanan.

#### D Kesimpulan dan Saran

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

- a. Pembangunan nasional bukan hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi pembangunan itu harus ditopang oleh budaya yang diamalkan penduduknya. Disamping mempertimbangkan aspek kehidupan bangsa lainnya seperti gatra politik dan hankam.
- b. Keanekaragaman budaya merupakan asset nasional dalam pembangunan. Karena puncak-puncak budaya daerah merupakan nilai komunikatif yang diterima oleh banyak orang. Budaya daerah tersebut dapat mengisi kekosongan

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

budaya nasional dan sebagai acuan bagi masyarakatnya dalam memacu pembangunan.

c. Pembangunan nasional yang tidak mengindahkan budaya akan mengancam pembangunan itu sendiri, hal ini dibuktikan dari kasus-kasus pelaksanaan pembangunan di daerah.

d. Strategi bhinneka tunggal ika dan asimilasi secara damai dapat dipakai untuk mengambil kebijakan pembangunan secara nasional.

e. Keragaman budaya bisa jadi penghambat, karena kondisi alami dari tiap daerah di daerah Indonesia (ketertinggalan pendidikan, panatik budaya) dan melahirkan kesetiaan yang tinggi pada daerah ketimpang pada kepentingan bangsa dan negara

## 2. Saran

a. Hendaknya sumber daya manusia yang ada di daerah diberikan kesempatan yang luas mendapatkan pendidikan ke luar daerah, sehingga melahirkan kader pembangunan yang berjiwa nasionalis.

b. Hendaknya pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung bagi sukubangsa yang terosolir harus tingkatkan, sehingga mereka merasakan semakin dekat dengan pusat.

c. Perlu adanya rekayasa sosial yang membuka peluang bagi adanya interaksi antar budaya daerah, seperti organisasi kemasyarakatan yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ✓ Alpien. (1982). Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- ✓ Budhisantoso, S. (1985). Kebudayaan dan Integrasi Nasional Dalam Masyarakat Majemuk. Makalah PPS-PKN-UI. Jakarta.
- ✓ \_\_\_\_\_ (1985) Kedudukan dan Peranan Kebudayaan daerah dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional. Penelitian Ilmiah Tentang Penelitian Kebudayaan Betawi. Jakarta.
- ✓ \_\_\_\_\_ (tanpa tahun). Masyarakat Indonesia Menjelang Abad XXI. Jakarta.
- ✓ \_\_\_\_\_ (tanpa tahun). Pengaruh Globalisasi Informasi Terhadap Sistem Nilai, Struktur dan Jaringan Sosial Masyarakat Pedesaan Di Indonesia. Jakarta.
- ✓ \_\_\_\_\_ (1995). Dimensi Sosial Budaya Masyarakat Lokal dan Kedudukannya Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. Seminar Nasional Lingkungan Hidup. Palangkaraya.
- ✓ Horton, Paul B. (1992). Sosiologi Jilid 1 & 2. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- ✓ Inayatulla. (1967). "Toward a non-Western Model of Development" in D.Leerner and Schramm. Communication and Change in the Developing Countries. Honolulu: University of Hawai Center Press.
- ✓ Koentjaraningrat. (1993). Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional. Jakarta: UI Press.
- ✓ Rogers. (1975). The Antropology of Modernization and the Modernization of Antropology. New York: Free Press.
- ✓ Rahardjo, Budi, Chodijah. (1983). Benturan Nilai-Nilai Budaya Di Daerah Transmigrasi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- ✓ Sianipar, MG. (1984). Pendidikan Politik Bangsa. Jakarta: Sinar Harapan.
- ✓ Schon, Donald. (1967). Technology and Change, The Infact of Invention and Innovation A American Socialand Economic Development. A Delta Book.

Siswono, Yudohusudo. (1996). Integrasi Nasional dan Tantangan di Masa Depan. Jakarta: Ceramah Ilmiah Pada Jurusan Sosiologi Fisip UI. 21 Mei 1996.

✓ Siamsuddin, Nazaruddin. (1989). Integrasi Politik Di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

✓ Todaro, Michael P. (1982). Economic for a Developing Word: An Introduction to Principles, Problem and Politics for Development. Longman Group Ltd. Burt Mill.